

Pengaruh Agama Islam dan Identitas Turki dalam Menghambat Perluasan Uni Eropa

Fardiana Ayu Notianti

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email: fardiayu@gmail.com

Abstract

Turkey is a country that have an important role for the European Union. The importance of Turkey to the EU and Europe itself is rooted on historical relations between the two sides, whether through war, diplomacy, commerce, art, and culture. For centuries, the relation between these two was marked by cooperation and convergence, as in the profound economic, cultural, art, and social exchanges between the Ottoman Empire and European powers. Simultaneously, conflict and competition also colored the relations between Europe and Turkey, especially in the Ottoman-Habsburg war era. This contrasting relations create contestation in identity and perception among EU countries against Turkey. This reflected in Turkey's accession being part of the official member of the EU whose progress has been slow since 1987. The European Union explicitly shows its opposition to Turkish full membership largely based on differences in Turkish culture, history and identity as a majority country Muslim. This paper seeks to clarify the identity of Turkey and the European Union, and seeks to determine whether the identity is culturally or politically influential on Turkish application to become a member of the European Union.

Key words: *Accession, European Union, Turkey, Identity, Religion, Secularization*

Abstrak

Turki merupakan salah satu negara yang memiliki peranan penting bagi Uni Eropa. Pentingnya Turki untuk Uni Eropa dan Eropa itu sendiri berakar dari hubungan bersejarah antara kedua belah pihak, baik itu melalui perang, diplomasi, perdagangan, seni, hingga budaya. Selama berabad-abad, hubungan antara kedua yang ditandai dengan kerjasama dan konvergensi, seperti dalam pertukaran ekonomi, budaya, seni, dan sosial yang mendalam antara Kekaisaran Ottoman dan kekuatan Eropa. Pada saat yang sama, konflik dan persaingan juga mewarnai hubungan antara Eropa dan Turki, terutama di perang era Ottoman-Habsburg. Hubungan yang kontras tersebut menciptakan kontestasi dalam identitas dan persepsi di antara negara Uni Eropa terhadap Turki. Hal tersebut tercermin dalam aksesi Turki untuk menjadi bagian dari anggota resmi Uni Eropa yang perkembangannya berjalan lambat dihitung sejak tahun 1987. Uni Eropa secara eksplisit juga menunjukkan sikap oposisinya terhadap keanggotaan penuh Turki yang sebagian besar didasarkan pada perbedaan kultur, sejarah dan identitas Turki sebagai negara mayoritas muslim. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan identitas Turki dan Uni Eropa, dan berusaha untuk menentukan apakah identitas tersebut secara budaya atau politik berpengaruh terhadap aplikasi Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa.

Kata Kunci: *Aksesi, Uni Eropa, Turki, Identitas, Agama, Sekularisasi*

Pendahuluan

Hubungan antara Turki dan Uni Eropa telah terjalin sejak lama, namun secara resmi keduanya menjalin

kerjasama yang termuat dalam Perjanjian Asosiasi (Tocci, 2014). Tetapi keterlibatan Turki tidak secara langsung menjadikan Turki sebagai anggota penuh Uni Eropa. Tahun 1987, Turki

mengajukan permintaan resmi untuk keanggotaan penuh, namun ditolak oleh Komisi Eropa pada tahun 1989 dengan berbagai alasan seperti ekonomi Turki yang tidak cukup berkembang, demokrasi Turki dianggap gagal untuk menjamin hak politik dan sipil, pengangguran di Turki akan menjadi ancaman bagi pasar Uni Eropa, dan karena perselisihan dengan Yunani atas Siprus juga belum terselesaikan (Wood dan Yesilada, 2004). Hingga pada Desember 1999 dalam Helsinki Summit, Dewan Eropa mempertimbangkan aplikasi keanggotaan Turki dengan memberi status sebagai negara kandidat dan mengundang Turki untuk bergabung dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur (Central and Eastern European Countries). Akan tetapi untuk mendapat keanggotaan Uni Eropa, Turki diharuskan memenuhi Kriteria Kopenhagen dan melakukan adaptasi sesuai dengan *acquis communautaire* sebagai syarat utama memulai negosiasi (Wood dan Yesilada, 2004). Sebagai respon keputusan Uni Eropa, pemerintah Turki mempersiapkan Program Nasional untuk Adopsi keanggotaan Uni Eropa pada bulan Maret di tahun 1999 dan mulai melakukan reformasi demokratisasi di bidang hubungan sipil-militer, hak asasi manusia, hak budaya, prosedur peradilan, kebijakan ekonomi, dan kebijakan melakukan negosiasi secara terbatas terkait persoalan dengan Siprus (Dahlman, 2004). Sebagai bentuk apresiasi dari kemajuan Turki menuju pemenuhan Kriteria Kopenhagen, Komisi Eropa merekomendasikan agar Dewan Eropa segera menyetujui dimulainya negosiasi akses. Dalam Brussel Summit 2004, Dewan Eropa kemudian memutuskan untuk memulai perundingan akses pada bulan Oktober 2005. Secara resmi negosiasi akses Turki dengan Uni Eropa dibuka dan dimulai dari bab ke-31 dari *acquis communautaire*.

Sayangnya proses akses keanggotaan Turki ini banyak mendapat penolakan, baik dari petinggi Uni Eropa maupun masyarakat Uni Eropa sendiri.

Penolakan ini dilatar belakangi karena adanya keraguan atas kemampuan Turki untuk beradaptasi dengan kebijakan Uni Eropa, juga berkaitan dengan stabilitas politik dalam negeri Turki, dan kekhawatiran masyarakat Eropa terkait realokasi sumber daya langka ke Anatolia yang nantinya akan membebani struktur pendanaan Uni Eropa (Hurd, 2006). Meskipun faktor tersebut memiliki signifikansi masing-masing, resistensi Uni Eropa terhadap akses Turki berakar lebih dalam daripada pertimbangan ekonomi dan politik domestik Turki. Penolakan terhadap akses Turki lebih dikarenakan alasan perbedaan agama dan identitas antara keduanya. Akses Turki dianggap mengancam gagasan Eropa sebagai peradaban Kristen. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan petinggi negara anggota Uni Eropa seperti Perancis dan Jerman. Mantan Presiden Perancis Valéry Giscard d'Estaing menyatakan bahwa Turki bukanlah negara Eropa dan mengakui Turki sebagai bagian Uni Eropa merupakan akhir dari Eropa (Hurd, 2006). Sedangkan Mantan pemimpin Kanselir Jerman Barat dan pemimpin Partai Sosial Demokrat (PSD) Helmut Schmidt juga berpendapat bahwa Turki seharusnya dikecualikan dari Uni Eropa karena peradabannya yang tidak layak, dan dengan membuka pintu masuk Uni Eropa untuk negara-negara Muslim seperti Turki menyebabkan penurunan derajat persatuan politik Uni Eropa yang tidak lebih dari komunitas perdagangan bebas (Teitelbaum dan Martin, 2003). Oleh karena itu, proses akses Turki menjadi kontroversial dalam hal identitas dan agama karena bukan hanya melibatkan akses potensial dari sebuah negara mayoritas Muslim ke Eropa, secara historis juga melibatkan Kekristenan Eropa, tetapi lebih mendasar karena akses ini membawa dilema yang panjang dalam internal Eropa tentang bagaimana agama dan politik berhubungan satu sama lain, mengingat Uni Eropa turut terlibat dalam pembentukan identitas melalui interaksi dengan Turki sebagai *the other* yang membuat identitas Eropa menjadi semakin terancam (Rumelili, 2004).

Penolakan terhadap keberadaan budaya dan agama dalam proses akses Turki tidak hanya tentang mempertahankan gagasan Kekristenan Eropa. Lebih dari itu, akses keanggotaan Turki telah menimbulkan kontroversi pada hal yang lebih mendasar yakni identitas dan politik agama di Eropa itu sendiri. Sekularisme Turki dinilai berbeda dengan sekularisme yang berlaku di Uni Eropa (Hurd, 2004).

Pembangunan Identitas Turki dan Uni Eropa

Samuel Huntington mendefinisikan peradaban sebagai entitas budaya yang didasarkan pada desa, wilayah, kelompok etnis, kebangsaan dan kelompok agama. Huntington juga mengidentifikasi delapan peradaban besar, dua di antaranya ada di Eropa: Barat dan Ortodoks Slavia. Dalam asumsinya, Huntington menekankan bahwa agama sebagai salah satu faktor terpenting yang membentuk peradaban. Baginya, faktor-faktor seperti perbedaan antar peradaban yang meliputi sejarah, bahasa, budaya dan tradisi jauh lebih mendasar daripada perbedaan diantara ideologi politik dan rezim politik. Huntington juga menghubungkan kemungkinan membangun blok ekonomi bersama dengan agama dan budaya.

Pembangunan identitas nasional Turki terbentuk dalam kerangka modernisasi Turki melalui tahapan formal dan legislatif dalam bidang sosial, pendidikan, dan budaya (Waxman, 2000). Modernisasi dan pembangunan bangsa Turki dimulai dan dilakukan dengan cara top-down dan menggunakan pendekatan paternalistik oleh elit negara yang dipimpin oleh Mustafa Kemal. Misi Mustafa Kemal dalam modernisasi ini adalah untuk membawa masyarakat Turki ke dalam tingkatan sosial, pendidikan, dan budaya yang sama dengan masyarakat Eropa serta menjadikan Turki bagian dari komunitas internasional –dengan kata lain untuk menjadikan Turki sebagai negara Eropa (Waxman, 2000). Gagasan

Atatürk untuk negara Turki yang baru melekat bersama dengan identitas Turki yang dibayangkan dan dikemas dalam ideologi resmi Kemalisme. Sedangkan gagasan tentang keunikan dan otonomi sejarah Eropa muncul pada masa invasi Islam, kaum barbar, dan Persia. Kekalahan invasi melahirkan benih identitas Eropa yang bersumber pada nilai-nilai Kristen. Masyarakat Eropa pada saat itu percaya hanya nilai-nilai Kristen yang mampu memberi perlindungan dari bangsa lain. Perlahan nilai-nilai Kristendom menyebar dan mendapat penerimaan oleh masyarakat Eropa pada saat itu. Hingga akhir abad ke-15, gagasan tentang Eropa masih bersifat geografis yang tunduk pada nilai-nilai Kristen yang menjadi identitas dominan di Eropa khususnya bagian barat. Sementara gagasan tentang Eropa moderen mulai muncul diawal abad 19, revolusi yang terjadi turut merubah gagasan dan sejarah Eropa. Pada masa ini gagasan tentang Eropa banyak dijadikan sebagai subyek perdebatan politik dan ideologi dengan nilai kebebasan, kekristenan, dan peradaban yang berperan penting dalam proses revolusi di Eropa (Wilson dan Dussen, 1995).

Revolusi Kemal sebagai Kerangka Pembentuk Identitas Turki

Modernisasi dan pembangunan nasional Turki terinspirasi oleh masa Pencerahan yang terjadi di Eropa. Mustafa Kemal pesimis dan memandang rendah kondisi masyarakat Ottoman paska Perang Dunia I, menurutnya masyarakat Ottoman pada saat itu tertinggal secara politik, sosial, dan budaya sehingga perlu menjalani perubahan radikal agar dapat mempertegas dirinya di antara kekuatan Eropa lainnya dalam tatanan politik paska perang. Revolusi Turki dicapai dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung dari awal Perang Kemerdekaan Turki tahun 1918 sampai penghapusan kekhalifahan pada Maret 1924, revolusi tersebut didominasi oleh transisi politik dan formal. Peran

Mustafa Kemal dalam gerakan revolusi adalah memusatkan upaya-upaya perlawanan Komite Perlindungan Hak Asasi melalui Komite Pertahanan Hak-Hak Anatolia dan Rumeli. Kemudian kelompok Kemalis berusaha memperoleh legitimasi internal dengan cara melawan otoritas Sultan yang tunduk pada sekutu. Untuk meraih legitimasi tersebut dibentuk Majelis Nasional (Grand National Assembly) di Ankara pada 23 April 1920 yang beranggotakan perwakilan terpilih dari seluruh wilayah Turki. Pada bulan Januari 1921, Majelis Nasional akhirnya mendeklarasikan kedaulatan eksklusif milik Turki yang dipercayakan kepada dewan yang dipimpin Mustafa Kemal. Deklarasi *The Fundamental Law* merupakan tahap penting transisi dari kerajaan multi-etnis ke negara bangsa, dan untuk pertama kalinya konsep negara Turki secara resmi memasuki wacana legitimasi kekuasaan politik. (Yilmaz, 2008). Pembentukan republik Turki secara sah dimulai dengan adanya deklarasi Ankara sebagai ibukota baru Turki, kemudian dilanjutkan dengan proklamasi republik dan pemilihan Mustafa Kemal sebagai presiden pertama, serta pengadopsian konstitusi republik. Bagian terpenting dari revolusi adalah menghancurkan warisan terakhir kekuasaan Kesultanan Ottoman yakni dengan menghapus sistem khalifah. Penghapusan sistem khalifah merupakan puncak dari proses sekularisasi politik yang nyata. Tindakan tersebut merupakan simbol bahwa Turki telah meninggalkan komunitas negara Islam. Penghapusan sistem khalifah melambangkan peralihan menuju Eropa dan menjauh dari Asia, dengan demikian upaya revolusi Turki ini dianggap sebagai proses Westernisasi (Yilmaz, 2008).

Tahap kedua terjadi pada tahun 1924 hingga 1927, berakhir dengan pidato Atatürk yakni Nutuk yang berisi penetapan garis besar dari sejarah resmi dan revolusi ideologi Turki yang baru yakni Kemalisme (Yilmaz, 2008). Tahap kedua revolusi dimulai secara *de facto* begitu republik secara resmi didirikan. Selama tahap kedua revolusi, Kemalisme

disebarluaskan sebagai ideologi nasional resmi dan fokus reformasi bergeser ke perubahan hukum, sosial dan budaya yang lebih luas jangkauannya. Secara keseluruhan reformasi ini memiliki dua tujuan dan konsekuensi. Pertama, bertujuan untuk mengurangi kemungkinan pengaruh Islam pada masyarakat, dan kedua, reformasi merupakan sebuah upaya untuk mendekatkan diri dengan Eropa (Gorys, 2010). Dalam bidang hukum revolusi dapat dicontohkan dengan pengadopsian hukum pidana baru pada Maret 1926 berdasarkan pada hukum pidana Italia, dan pada bulan Oktober kode hukum perdata yang mencontoh Swiss diperkenalkan, fungsi dan nilai-nilai Islam sebagai tata sistem hukum dihilangkan. Sedangkan di bidang sosial dapat dilihat dalam sistem pendidikan nasional Kemalis yang berupaya mengurangi pengaruh Islam pada sekolah-sekolah melalui kurikulum yang diawasi negara dan pengenalan huruf Latin sebagai pengganti huruf-huruf Arab (Waxman, 2000).

Pembentukan Identitas Eropa

Sepanjang abad 19, terdapat dua faktor yang membentuk gagasan moderen atas kesatuan Eropa sebagai model budaya. Pertama adalah gagasan tentang Eropa yang berevolusi dari masa Kristendom ke masa Pencerahan yang membawa nilai-nilai ideal Kristen yang humanis, dan keyakinan akan sistem nilai yang universal untuk tujuan kemajuan Eropa. Cita-cita ini kemudian menjadi inti dari identitas Eropa dan diwujudkan dalam gagasan modernitas. Kedua adalah cita-cita untuk menciptakan kesatuan politik Eropa yang pada dasarnya merupakan adaptasi dari cita-cita nasional (Delanty, 1995). Perkembangan sejarah Eropa diketahui terbentuk dalam garis unilinear, dari Yunani kuno dan Kekaisaran Romawi menuju Latin Kristendom, Renaisans, dan modernisasi industri, hingga pada Eropa kontemporer merupakan konteks utama dalam pembentukan identitas Eropa. Lebih lanjut, gagasan tentang Eropa pada periode modern tidak pernah

membebaskan diri dari nexus Timur-Barat yang berakar dalam dunia Kristen (Delanty, 1995). Kekaisaran Romawi tidak terlalu banyak memberikan warisan nilai dan gagasan. Seperti aturan hukum Romawi yang hanya bertahan hingga akhir masa Kekaisaran. Ide Yunani tentang seni, filsafat, dan politik ditransmisikan melalui pengalaman Romawi dalam bentuk militer, birokrasi dan infrastruktur. Beralih ke masa Pencerahan yang berpengaruh secara signifikan bagi perubahan pola pikir masyarakat Eropa. Walaupun terbatas pada kalangan elit saja, tetapi gerakan intelektual terjadi secara multinasional oleh skolar-skolar Eropa membawa dampak yang cukup mendalam. Semangat ilmiah dan skeptisme masa Pencerahan membuat Eropa jauh lebih unggul dari benua lain. Memasuki masa industrialisasi, kejayaan Eropa mulai terlihat. Tetapi yang terpenting pada masa ini adalah pengalaman menciptakan citra diri Eropa yang sesungguhnya. Di awal masa industrialisasi, Eropa mulai menghasilkan kekayaan, teknologi, dan kekuatan militer yang memberikan Eropa dominasi di dunia untuk waktu yang cukup lama (Wintle, 1996).

Lebih lanjut, dalam proses pembentukan identitas Eropa terjadi Eropanisasi yang mengacu pada pengaruh dari hasil kelembagaan dan kebijakan di tingkat Eropa terkait pemerintahan domestik, politik, dan kebijakan. Hal ini juga merujuk, pada berbagai kebijakan dan pemerintahan nasional di Uni Eropa dan institusi lainnya (Ertugrul, 2001). Secara garis besar, kebijakan Eropanisasi yang terjadi di Uni Eropa adalah untuk membangun, menyebarkan, dan melembagakan peraturan dan prosedur baik formal maupun informal, paradigma kebijakan, keyakinan bersama, dan bisnis politik. Dalam beberapa periode banyak karya pemikiran yang berkaitan dengan identitas, sejarah, dan gagasan di Eropa. Dalam banyaknya karya pemikiran tersebut, Uni Eropa terpilih menjadi perwakilan dan membawa gagasan sejarah yang khas untuk Eropa, sehingga

dengan berjalannya waktu Uni Eropa dipandang sebagai indikator dari Eropa (Huntington, 1993).

Peran Sekularisasi dalam Proses Akses Turki ke Uni Eropa

Charles Taylor mendefinisikan sosial imajiner sebagai cara orang membayangkan keberadaan sosial mereka, bagaimana kecocokan mereka bersama dengan orang lain, bagaimana keadaan di antara mereka dan rekan-rekan mereka, tempat terwujudnya harapan, dan lebih dalam yakni tentang gagasan normatif dan gambaran yang melandasi ekspektasi (Taylor, 2002). *Laisisme* dan *sekularisme* Judeo-Kristian adalah komponen penting dari sosial imajiner Eropa. Bersama dengan faktor-faktor ekonomi dan politik, keduanya membentuk diskursus politik sekularisme yang berdampak pada munculnya skeptisisme di Uni Eropa terkait akses Turki. Sedangkan Alev Çinar mendefinisikan pendekatan sekularisme sebagai serangkaian proyek politik yang saling terkait dan berusaha untuk mengubah dan menyusun kembali tatanan sosial politik atas dasar seperangkat norma dan prinsip konstitutif (Çinar, 2005).

Sekularisme Judeo-Kristian dan Akses Turki

Sekularisme Judeo-Kristian adalah bentuk dari kekuasaan politik dimana agama Judeo-Kristian dan politik sekuler modern bercampur dengan cara tertentu, yang masing-masing memperkuat satu sama lain. Sekularisasi, dalam pandangan ini, adalah realisasi dari tradisi agama Barat yang merupakan bagian dari dasar moral peradaban Barat (Taylor, 2005). Implikasi signifikan dari pemisahan sekularisme agama dari politik adalah warisan demokrasi sebagai pencapaian tertinggi Eropa yang membuatnya lebih unggul dibanding pesaingnya (Hurd, 2004). Jika Judeo-Kristian adalah fondasi demokrasi sekuler, dan pemisahan gereja dengan negara adalah sebuah pencapaian yang berevolusi dari Kekristenan, maka potensi untuk

sekularisasi identitas budaya tertentu, sejarah peradaban, dan lokasi geografis sangatlah besar. Perbedaan peradaban dalam penyebutan sekuler dan religius adalah sesuatu yang bersifat tetap dan pasti, keduanya tidak dapat saling melampaui satu sama lain. Pendekatan eksklusivis terhadap batas-batas budaya demokrasi adalah ciri khas dari sekularisme Judeo-Kristian (Hurd, 2004).

Sekularisme Judeo-Kristian memiliki implikasi penting dalam perdebatan akses Turki. Dalam *Vers un Islam Européen*, Olivier Roy menjelaskan bahwa penolakan terhadap keanggotaan Turki dari Uni Eropa bukan karena ketidakmampuan Turki dalam memenuhi tuntutan Uni Eropa untuk melakukan demokratisasi, yang mana menjadi alasan yang baik, tetapi yang mendasar adalah karena Turki bukanlah "Eropa", hal ini berarti bahwa Turki tidak memiliki modal bersama Kekristenan sebagai dasar dari Laisisme (Roy, 1999). Dengan kata lain Turki tidak akan diterima dalam keanggotaan Uni Eropa, karena meskipun sekuler, para pengambil kebijakan Uni Eropa dan mayoritas publik Eropa tidak yakin apakah Turki cukup sekuler seperti ke'sekuler'an Eropa. Hal ini dikarenakan Turki tidak memiliki kesamaan pengalaman budaya dan agama yang menjadi dasar terbentuknya sekularisme dan demokrasi Eropa. Perumusan sekularisme Judeo-Kristian untuk 'Eropa' bergantung pada asumsi bahwa demokrasi sekuler hanya dapat sepenuhnya terwujud dalam masyarakat yang memiliki warisan Judeo-Kristian. Dalam pandangan ini, dasar Judeo-Kristian menjadi satu-satunya fondasi yang mungkin bagi terbentuknya sekularisme dan demokrasi Eropa (Roy, 1999). Hubungan antara nilai-nilai Kristen dan bentuk demokrasi Eropa berdampak pada munculnya kebencian terhadap identitas ke-Islaman Turki dan skeptisme terkait potensi keanggotaan Turki sebagai anggota Uni Eropa yang mayoritas non Kristen. Secara inheren Turki dipandang berbeda dari Eropa karena keberadaan identitas Eropa yang

eksklusif berdasarkan letak geografis, budaya dan agama (Rumelili, 2004).

Sekularisme Judeo-Kristian memiliki pengaruh cukup besar atas pendekatan-pendekatan Uni Eropa dalam menanggapi tantangan Kemalisme Turki terhadap sekularisme Judeo-Kristian. Perspektif ini menegaskan bahwa sekularisasi dan demokratisasi adalah ciri khas yang unik bagi Barat (Judeo-Kristian). Kaum sekuler Judeo-Kristian menilai bahwa upaya untuk menggabungkan masyarakat mayoritas Muslim ke dalam sebuah komunitas demokrasi, sekuler (dan Judeo-Kristian) Uni Eropa adalah sebuah kesia-siaan (Hurd, 2006). Dari perspektif ini, Turki akan selalu dianggap tidak dapat memenuhi Kriteria Kopenhagen karena komitmen budaya dan agamanya, dan karena itu tidak layak untuk menjadi bagian dari Uni Eropa. Secara historis perbedaan antara otoritas agama dan politik tidak hanya dari Turki tetapi dari dunia Islam secara umum. Peradaban Muslim dianggap sama sekali tidak memiliki bentuk-bentuk sekularisme pribumi dan bersikeras menolak sekularisme Barat. Bagi Judeo-Kristian, sekularisme pada akhirnya tidak sesuai dengan Islam dan tidak mungkin direalisasikan di Turki atau di tempat lain dengan mayoritas Muslim (Hurd, 2006).

Laisisme dan Akses Turki

Laisisme adalah bentuk sekularisme kedua yang berkontribusi pada munculnya skeptisme di Eropa terkait akses Turki. Laisisme merujuk pada upaya untuk membersihkan agama dari politik dan dikaitkan dengan kontrol intensif negara terhadap institusi dan ekspresi keagamaan (Hurd, 2006). Laisisme mendukung peran kuat negara dalam pengaturan agama dan sangat berhati-hati dengan pelanggaran agama di ruang publik. Laisisme menganggap peningkatan atau rekonfigurasi peran publik terhadap agama sebagai pelanggaran dalam kehidupan publik, dan berbahaya bagi kekuasaan negara (Hurd, 2004).

Berbeda dengan sekularisme Judeo-Kristian yang bersikeras pada sifat identitas Eropa yang baku dan eksklusif, kaum Laisisme percaya bahwa pengecualian Turki dari Eropa atas dasar budaya dan agama tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, Laisisme mengarahkan pada serangkaian kesimpulan yang berbeda mengenai identitas Eropa dan hubungannya dengan akses Turki. Laisisme mengadopsi versi inklusivitas dari identitas Eropa seperti pendapat Rumelili, bahwa membangun Turki yang berbeda dari Eropa hanya untuk memperoleh karakteristik (Rumelili, 2004). Menurut argumen ini, jika Turki sesuai dengan norma-norma Eropa (Laisis) mengenai agama dan politik, dan dengan pertimbangan lain, Turki harus diterima ke Uni Eropa. Masalahnya adalah bukan karena secara konstitusional maupun kultural Turki tidak mampu memenuhi standar Uni Eropa, tetapi pencapaian Turki dalam pembangunan politik, ekonomi, dan politik-agama belum berhasil mencapai tingkatan yang dapat memuaskan Uni Eropa. Misalnya jika Turki mengembangkan institusi ekonomi dan politik sesuai dengan nilai-nilai dan standar Uni Eropa, tentunya Turki akan berhasil menjadi anggota Uni Eropa, meskipun perbedaan yang disebut oleh banyak pihak masih tetap melekat (Rumelili, 2004).

Bagaimanapun kaum Laisis tetap khawatir terkait upaya akses Turki ke Uni Eropa dan kemunculan Kemalisme di Turki. Kekhawatiran ini dipicu adanya kebangkitan agama di Turki yang menantang norma-norma universal Eropa terkait pembagian (laisis) antara agama dan politik yang diadopsi dalam Kemalisme Turki, sementara dalam beberapa dekade terakhir keberadaan agama yang terorganisir telah menurun di Eropa (Wæver, 1998). Ketidaklayakan Turki sebagai anggota Uni Eropa karena Turki berisiko melanggar norma-norma Laisisme yang merupakan salah satu prinsip dasar demokrasi Eropa. Perlawanan terhadap Kemalisme –yang diekspresikan dalam istilah Islam–

muncul karena Kemalisme dianggap sebagai ancaman bagi kaum Laisis yang secara tegas memisahkan pemisahan kehidupan publik maupun pribadi dari konsep serta praktik keagamaan. Bagi kaum Laisis, kelemahan Turki yang melibatkan Islam dalam politik domestiknya (Hurd, 2004).

Pengaruh Respon Elit dan Publik Eropa Terhadap Keanggotaan Turki

Perdebatan tentang identitas dan agama antara Turki dan Uni Eropa mencerminkan bahwa perbedaan identitas dan agama membawa pengaruh besar dalam Uni Eropa karena akan mengubah bahkan menghilangkan makna identitas Eropa, dan hal ini tentunya akan menimbulkan ketidaknyamanan. Respon penolakan yang muncul dari elit maupun publik Eropa mengindikasikan bahwa perbedaan yang dimiliki oleh Turki tidak dapat dihilangkan begitu saja. Faktor kunci yang membedakan Turki secara kultural adalah akar keagamaannya, bersamaan dengan persepsi keterbelakangan atau non-Eropa yang terikat didalamnya. Perbedaan antara budaya Eropa dan Muslim secara umum akan menimbulkan ancaman terhadap budaya dan cara hidup masyarakat Eropa. Perbedaan identitas dan agama yang dimiliki Turki telah menyebabkan ketegangan pada level pembuat keputusan dan warga negara antara Uni Eropa dan Turki.

Pendapat kontra terkait keanggotaan Turki di Uni Eropa, didasari pemikiran bahwa ketika berhadapan dengan identitas dan agama yang berbeda, muncul tiga kemungkinan pola relasi, pertama yakni keanggotaan yang berfokus pada nilai-nilai politik demokrasi dan mengabaikan perbedaan budaya (proyek peradaban); kedua memasukkan unsur perbedaan budaya ke dalam definisi dasar identitas; ketiga yakni menggabungkan keduanya, modifikasi dengan menciptakan identitas baru. Sejauh ini, Uni Eropa cenderung memaksakan norma dan nilai

politik kepada negara-negara kandidat untuk menerima perbedaan budaya sebagai dasar identitas Eropa. (Tunkrova, 2008). Terlebih dalam proses pendiriannya, Uni Eropa sejak awal dibentuk telah menggunakan nilai-nilai Kristen sebagai dasar identitas Eropa. Hal ini terlihat jelas dalam Perjanjian Konstitusi dan Perjanjian Lisbon yang didalamnya termuat nilai-nilai Kristen. Nilai-nilai berbasis Kristen ini menjadi fondasi Uni Eropa untuk memperkuat identitas Eropa, bahkan melebihi identitas negara atau individu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Uni Eropa menjadi institusi yang memasukkan agama dan memberi pengakuan spesial terhadap nilai-nilai Kristen (Tunkrova, 2008).

Para pemimpin negara Eropa mendefinisikan Uni Eropa dengan istilah yang sedikit berbeda, bahkan terkesan mengeksklusifkan Uni Eropa dengan menolak secara tegas keanggotaan Turki. Seperti mantan Komisaris Uni Eropa Fritz Bolkeshtein yang menyatakan:

“Turkey’s capital is not in Europe. Ninety-five % of its population lives outside Europe, and it is not a European country. Admitting predominantly Muslim Turkey would mark the end of the European Union. People who backed Turkey’s accession are the adversaries of the European Union.” (BBC, 2004)

Valery Giscard d’Estaing, mantan Presiden Perancis (1974-1981) sekaligus Presiden Konvensi Masa Depan Uni Eropa, mendefinisikan dasar-dasar identitas Uni Eropa merupakan warisan budaya Yunani Kuno, warisan agama Eropa, Masa Renaisans dan cita-cita abad Pencerahan. Sedangkan Turki memiliki budaya, pendekatan, dan cara hidup yang jauh berbeda dengan Eropa. Apabila Turki menjadi bagian dari Uni Eropa tentu hal tersebut menjadi “akhir Eropa” (Teitelbaum dan Martin, 2003). Terlebih saat Perancis berada dalam

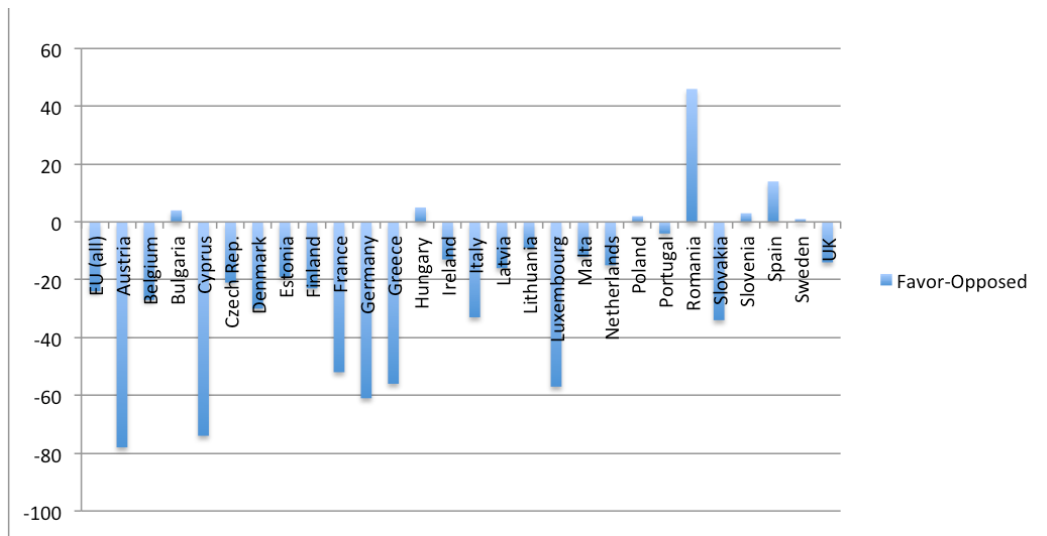
kepemimpinan Presiden Nicholas Sarkozy yang berpendapat

“Because we do have a problem of integration, which points to the question of Islam in Europe. To pretend that this is not a problem would be to hide reality, if you take in 100 million Muslim Turks, what will happen?” (Çagaptay, 2007)

“Turkey has no place in Europe its place is in Asia and Turks are not European, they should only be offered a privileged membership not a full accession” (Çagaptay, 2007)

Lebih lanjut, meskipun dapat dikatakan bahwa Turki telah berada di Eropa sejak jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, opini publik Uni Eropa menampilkan keraguan kuat atas upaya Turki untuk menjadi anggota resmi dari benua Eropa melalui Uni Eropa. Survei Eurobarometer pada 2005 menunjukkan bahwa di 27 negara anggota Uni Eropa, satu dari dua responden menentang Turki bergabung dengan Uni Eropa; 54% berpikir bahwa perbedaan budaya antara Uni Eropa dan Turki yang terlalu banyak untuk memungkinkan akses, sedangkan 55% setuju bahwa sebagian Turki milik Eropa, namun sebatas faktor geografis semata. Hal ini menguatkan dan menunjukkan ide bahwa meskipun Turki berada di Eropa, namun Turki bukanlah Eropa itu sendiri. Survey lain dari Eurobarometer pada 2005 memperlihatkan bahwa 63% dari masyarakat di Uni Eropa berpikir bahwa perbedaan budaya antara Turki dan Uni Eropa terlalu signifikan untuk memungkinkan akses Turki ke Uni Eropa, dan di saat yang sama ada ketakutan yang kuat dalam masyarakat di Eropa bahwa akses Turki akan berarti masuknya besar imigran Muslim (Eurobarometer, 2005). Opini publik di Uni Eropa terhadap keanggotaan Turki di tahun 2008 juga menunjukkan adanya skeptisme masyarakat negara anggota Uni Eropa terhadap prospek bergabungnya Turki ke dalam Uni Eropa.

Tabel 1: Net Support Untuk Keanggotaan Turki di Uni Eropa



Sumber: Eurobarometer, 2008

Penolakan yang muncul baik dari para pemimpin negara Eropa maupun masyarakat Uni Eropa terhadap keanggotaan Turki karena perbedaan latar belakang identitas dan agama adalah sebuah kewajaran. Terlebih jika melihat kembali pada aspek sejarah dan agama, dalam beberapa literatur dikatakan bahwa Turki diidentifikasi sebagai “the other” atau "penyerbu". Klaim ini didasari bahwa secara kultural dan historis Turki sejak lama dianggap sebagai musuh Eropa. Invansi yang dilakukan oleh Turki terhadap Eropa di masa lalu masih meninggalkan trauma. Oleh karenanya bagi sebagian anggota Uni Eropa, menerima Turki sebagai bagian dari Uni Eropa akan menjadi sebuah penghinaan terhadap basis identitas dan budaya yang telah dibangun oleh Uni Eropa (Tekin, 2010).

Kesimpulan

Uni Eropa yang bersandar pada landasan budaya bersama Eropa dan Kekristenan Barat menganggap perbedaan budaya dan agama akan menghambat integrasi ekonomi regional. Identitas didefinisikan dalam suku atau agama, hubungan us versus them muncul dalam kesadaran antara masyarakat yang memiliki perbedaan etnis atau agama. Perbedaan budaya dan agama juga menciptakan perbedaan kebijakan

atas isu-isu seperti hak asasi manusia, imigrasi, perdagangan dan lingkungan. Dengan mengidentifikasi pemahaman identitas Uni Eropa sebagai negara dengan latar belakang sejarah agama Katolik yang kental serta proses sekularisme, membuat sulit bagi banyak negara-negara Eropa untuk merangkul Turki ke dalam Uni Eropa. Tradisi Eropa yang berorientasi era Renaissance dan kental akan ide sekularisme, masih sangat berpengaruh pada pola pikir bahwa sekularisme menandakan kemajuan dan modernitas sementara agama menjadi tanda stagnasi. Permasalahannya, Turki tidak melewati masa kekristenan di era Christendom era pertengahan, dan juga melewati era Renaissance dan dengan demikian, Turki tidak memiliki pola pikir sekularisme Kristen yang sebagian besar dimiliki oleh negara anggota Uni Eropa. Tidak heran upaya Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa telah terbukti menjadi kontroversial. Dengan mayoritas masyarakatnya yang beragama Muslim, Turki dianggap sebagai the other atau orang luar bagi negara-negara anggota Uni Eropa lainnya; mendukung Turki untuk bergabung, sama dengan memerlukan pemikiran ulang mengenai ide-ide sekularisme Eropa.

Pencalonan keanggotaan Turki merupakan tantangan dan bahkan merubah konsep dan praktik sekularisme Eropa. Sebelum mengakui Turki sebagai bagian dari Uni Eropa, Eropa akan menekan Turki untuk menerima standar dan praktik hukum Uni Eropa, lembaga keuangan dan politik. Namun, secara paradoks, dalam domain agama dan politik, integrasi Turki ke dalam Uni Eropa hanya akan berhasil jika Eropa melakukan peninjauan kembali terhadap asumsi mereka tentang politik, agama, dan landasan moral demokratisasi. Singkatnya, pencalonan Turki mewajibkan masyarakat Eropa untuk mempertimbangkan kembali apa artinya menjadi Eropa yang sekuler. Pencalonan Turki merubah dan menantang persamaan antara identitas Eropa dan bentuk-bentuk sekularisme lainnya. Dengan latar belakang persaingan agama dan peradaban dengan Eropa, dan hingga saat ini masih kental dengan corak budaya Islam; Turki dianggap terlalu berbeda dari negara-negara

anggota Uni Eropa lainnya. Hal ini, meski tidak terlihat secara pragmatis dalam kaitannya dengan upaya akses menuju Uni Eropa, merupakan salah satu faktor adanya cara pandang berbeda dari negara-negara anggota Uni Eropa dalam melihat Turki. Turki tidak dilihat sebagai satu negara dengan prospek yang besar bagi Uni Eropa kedepannya, namun banyak yang melihat Turki sebagai ancaman baru terhadap identitas dan budaya Uni Eropa yang telah terbentuk sejak lama. Berangkat dari hal tersebut, maka menjadi masuk akal jika hingga saat ini upaya akses Turki menuju Uni Eropa menemui banyak ganjalan, terutama dari negara-negara anggota lainnya yang merasa terancam dengan kehadiran Turki di Eropa. Meski Turki memenuhi Kriteria Copenhagen yang merupakan persyaratan untuk menjadi anggota Uni Eropa, namun nyatanya hingga saat ini tidak ada kejelasan mengenai perkembangan Turki dalam aksesinya menuju Uni Eropa.

Daftar Pustaka

Buku

- [1] Çinar, Alev. *Modernity, Islam, and Secularism in Turkey*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005
- [2] Delanty, Gerard. *Inventing Europe: Idea, Identity, Reality*. London: MacMillan Press, 1995
- [3] Gorys, Andrea. *DuMont Reise-Taschenbuch Istanbul*. Osterfilden: Dumont Reiseverlag, 2010
- [4] Tekin, Beyza C.. *Representation and Othering in Discourse: The Construction of Turkey in the EU Context*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2010
- [5] Wæver, Ole. "Insecurity, Security and Asecurity in the West European Non-war Community." dalam *Security Communities*. Emanuel Adler dan Michael Barnett (eds.) Cambridge: Cambridge University Press, 1998
- [6] Wintle, M.. "Cultural Identity in Europe: Shared Experience", dalam *Culture and Identity in Europe*, M. Wintle, (ed.) Aldershot: Avebury, 1996
- [7] Wood, David M., dan Birol A. Yesilada. *The Emerging European Union 3rd ed*. New York: Pearson Longman, 2004
- [8] Yilmaz, Hakan. *The Kemalist Revolution and the Foundation of the One-Party Regime In Turkey: A Political Analysis*. Ankara: Yetkin Yayinevi, 2008

Jurnal

- [9] Dahlman, Carl. "Turkey's Accession to the European Union: the Geopolitics of Enlargement." *Eurasian Geography and Economics*, No. 8, (2004)
- [10] Ertugrul, Kursad. "Contemporary Image of European Identity and Turkish Experience of Westernization." *Central European Political Science Review* Vol.2, No 6, (2001)
- [11] Huntington, Samuel. "The Clash of Civilizations." *Foreign Affairs* Vol.72, Issue 3, (1993)
- [12] Hurd, Elizabeth Shakman. "Negotiating Europe: the Politics of Religion and the Prospects for Turkish Accession." *Review of International Studies*, No. 32, (2006)
- [13] _____ . "The Political Authority of Secularism in International Relations." *European Journal of International Relations*, 10:2, (2004)
- [14] Rumelili, Bahar. "Constructing Identity and Relating to Difference: Understanding the EU's Mode of Differentiation." *Review of International Studies*, 30, (2004)
- [15] Taylor, Charles. "Modern Social Imaginaries." *Public Culture*, 14:1 (2002)
- [16] _____ . "Walls of Separation: A Metaphor Which Has Outlived its Time." *Keynote Address, Conference on Theology, Faith & Politics*, (2005) Northwestern University, Evanston, IL

- [17] Teitelbaum, Michael, dan Philip Martin. "Is Turkey Ready for Europe?." *Foreign Affairs* 82.3 (2003)
- [18] Tocci, Nathalie. "Turkey and the European Union: A Journey in the Unknown." *Turkey Project Policy Paper*, no. 5 (2014)
- [19] Tunkrova, Lucie. "Imagining Europe: European Identity and Turkish Accession Process.", *The International Journal of the Humanities* Vol 6 (7), 2008
- [20] Waxman, Dov. "Islam and Turkish National Identity: A Reappraisal," *Turkish Yearbook of International Relations* 30 (2000)
- [21] BBC News, "Turkey entry would destroy EU" dalam <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/2420697.stm> (diakses 26 Mei 2018)
- [22] Eurobarometer, "Public Opinion," 2005 dalam http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb63/eb63_en.htm (diakses 2 Februari 2018).

Artikel Website